

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI POLA REKRUTMEN POLITIK DALAM PERSPEKTIF  
PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG  
PARTAI POLITIK**

**SKRIPSI**

Oleh:

**SURYA HIDAYAT BOKINGS  
NIM 271414016**

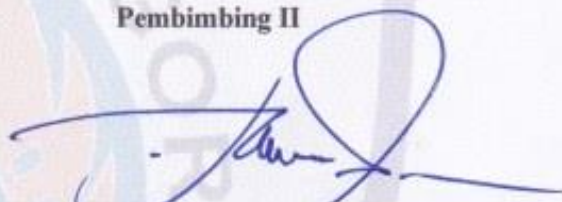
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

**Pembimbing I**



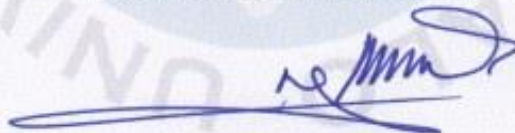
**Prof DR Johan Jasin, SH., M.H  
NIP. 195406251981021001**

**Pembimbing II**



**Zamroni Abdussamad, SH., MH  
NIP. 197007122003121002**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ilmu Hukum**



**Suwitno Y. Imran, SH., MH.  
NIP. 198306222009121004**

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI POLA REKRUTMEN POLITIK DALAM PERSPEKTIF  
PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG  
PARTAI POLITIK

SKRIPSI

Oleh:

**SURYA HIDAYAT BOKINGS**  
NIM 271414016

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Penguji

1. **Weny A. Dungga SH.MH**  
Nip: 196805222001121001

: (.....)

2. **Dolot Alhasni Bakung SH.MH**  
Nip: 198508272009121005

: (.....)

3. **Prof. Dr. Johan Jasin, SH.MH**  
Nip: 195406251981021001

: (.....)

4. **Zamroni Abdussamad, SH.MH**  
Nip: 197007122003121002

: (.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum



**M. Rusdiyanto Puluhulawa, SH., MHum**

NIP. 197011051997031001

## ABSTRAK

Polemik yang muncul dalam sistem rekrutmen politik saat ini tidak terlepas dari dominasi pengurus pusat dalam mengambil keputusan politik. Hal ini disebabkan oleh Undang-Undang Partai Politik memberikan ruang kepada pengurus pusat untuk berperan dominan dalam setiap pengambilan keputusan organisasi partai politik khususnya mengenai rekrutmen politik yaitu pemilihan Presiden, Anggota DPR/DPRD, dan Kepala Daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :(1) Bagaimana penerapan kebijakan partai politik terhadap rekrutmen politik; (2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam rekrutmen partai politik. Penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus agar dapat menjawab isu hukum yang diajukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, pengambilan keputusan dalam sistem rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik mengalami turbulensi. Peran pengurus pusat partai politik yang bisa menganulir keputusan yang ada di daerah memicu pecahnya kesatuan partai antara pengurus pusat dan pengurus daerah. Ketidaksiapan partai politik menyebabkan hubungan kepengurusan lebih sentralistik dan tidak memberikan wewenang luas kepada pengurus daerah untuk melakukan rekrutmen politik khususnya penentuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. *Kedua*, kelemahan UU Partai Politik yang membuka ruang bebas kepada pengurus pusat untuk bisa menganulir keputusan pengurus daerah perlu diperbaharui kembali. Keputusan partai politik dalam mengambil keputusan penentuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah akan ditentukan oleh pengurus daerah sebagai bentuk model alternatif untuk mendorong peran pengurus daerah dalam menggerakkan mesin partai dan menjaga keutuhan partai politik selama mengikuti pemilihan kepala daerah.

**Kata Kunci** : *Rekrutmen Politik, Partai Politik*

**Juridical Analysis of Political Party Policy on Political Recruitment Patterns  
based on the Article 29 of Act Number 2 the Year of 2011 on Political Parties**

Surya Hidayat Bokings

**ABSTRACT**

The polemic that emerges in the current system of political recruitment is related to the dominance of the central board in making a political decision. The central board is given considerably high freedom in the decision of political party, especially on the political recruitment that is the presidential election. The Members of House of Representatives (DPR) / Regional House of Representative (DPRD) and the Regional Leader which regulated on the article 29 of Act number 2, the year 2011.

The problems statements of this study are (1) How the implementation of political party policy towards political recruitment is; (2) What the inhibiting factors on the political parties' recruitment are. This normative research used technique or procedure of study referred to some legal principals relating to the substance of the private or general law regulation thus be able to respond to issue of the proposed law.

The results of this study reveal that, *first*, the decision making in the political recruitment system conducted by political parties experienced turbulence. The role of the Central Board of Political Parties that annul the decision on the region could lead to the disagreement between the Central Board and Region Board on the political parties. The uncertainty leads to centralize management and unproviding of broad authority to the regional board in recruiting, especially the head of regional or the deputy of regional. *Second*, reconsideration of the law of the political parties in the decision making needed to be done. The regional board will be the one who decides in the recruitment of the head and deputy of the region. It is aimed to encourage the regional board in maintaining the integrity of political parties during the following regional head elections.

**Keywords:** *Political Recruitment, Political Parties*

